

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi): Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Umum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Andrew Belsey, *et.al, Ethical Issues in Journalism and The Media*, (London: New York Roulledge, 1992)
- Cholid Narbuko, *et.al, Metodologi Penelitian, Cetakan Ketujuh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- Institute for Criminal Justice Reform, Open Data Forum Indonesia, dan Yayasan TIFA, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015)
- Phillipus M. Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Rizky Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019)
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982)
- _____, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Salim HS, *et.al, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

B. JURNAL

Anjas Putra Pramudito. “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. *Jurist-Diction* Vol. 3 (4) 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>

Anton Hendrik Samudra. “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.1 Januari-Maret 2020*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>

Errika Dwi Setya Watie. “Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)”, *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>

Jamin Ginting. “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Law Review* Volume XIX, No. 3 – Maret 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>

Nur Aini Rakhmawati, et.al, “Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual”, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 3, No.2 Oktober 2019 Halaman 297-304. DOI:<http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.2545>

Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9-16. DOI: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*. Vol.5 No. 1 Januari-April 2016. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

C. HASIL PENELITIAN

Dece Wanda Sari, “Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)”. Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008

F. WEBSITE/INTERNET

Anita Septiani Rosana, “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia”.
<https://media.neliti.com/media/publications/218225-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunik.pdf>, diakses pada 18 April 2021

“Benarkah Netizen Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia?”.
<https://indonesiabaik.id/infografis/benarkah-netizen-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia>, diakses pada 19 Desember 2021

Diana Kusumasari, “Hak Privasi”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi>, diakses pada 7 Agustus 2021

Josua Sitompul, “Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi-Sembunyi?”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5496be4d1947b/bolehkah-merekam-suatu-peristiwa-secara-semunyi-semunyi/>, diakses pada 19 Desember 2021

“Korean Photo Law and You (한국의 '초상권침해'에 대한 잘 못 된 생각) -- UPDATED!”.
https://metropolitician.blogs.com/scribblings_of_the_metrop/2010/12/korean-photo-law-and-you-한국의-초상권침해에-대한-잘-못-된-생각.html, diakses pada 16 Desember 2021

Michelle Seidel, “Laws About Being Photographed Without Permission”.
<https://legalbeagle.com/8608636-laws-being-photographed-permission.html>, diakses pada 16 Desember 2021

M. Ikhsan, “Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara”.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>, diakses pada 16 Desember 2021

“Pakar Respons Microsoft: Netizen Indonesia Mengerikan”.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301122720-185-612166/pakar-respons-microsoft-netizen-indonesia-mengerikan>, diakses pada 19 Desember 2021

Utami Argawati, “Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD”.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828&menu=2>, diakses pada 18 April 2021

“6 Bukti Ntizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang”.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti->

netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun?page=all,
diakses pada 16 Desember 2021

G. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Raden Wisnu Bagus Wicaksono, Asisten Pengawas Kajati DKI Jakarta, Koi Café Gallery Kemang, Jakarta Selatan, Tanggal 17 November 2021, pukul 19.00 WIB

Hasil wawancara dengan Rusdi Dalby, Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan, Tanggal 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

H. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENULISAN TUGAS AKHIR

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021)

